

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Djamali, 1990, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2011, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, Grafindo, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Intenasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irawan Sukarno, 2011, *Aku "Tiada" Aku Niscaya: Menyingkap Lapis Kabut Intelijen*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2013, *Kupas Tuntas Intelijen Negara dari A sampai Z*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R.Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas

Indonesia (UI-Pers), Jakarta.

Supono Soegirman, 2012, *Profesi Unik Orang-Orang Aneh*, Media Bangsa, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/J.A/9/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung RI No : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-017/A/JA/08/2015 tentang Penyelidikan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi.

C. KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.

D. WEBSITE

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_negeri diakses pada 11 April 2019 pukul 21.32.

<https://jurnalintelijen.net/2015/12/28/peran-intelijen-dalam-pencegahan-penanganan-dan-pemberantasan-korupsi/> diakses pada 10 November 2018 pukul 20.59.

<https://news.detik.com/berita/d-3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-indonesia-peringkat-ke-96> diakses pada 7 Desember 2018 pada 21.33.

<https://m.detik.com/news/berita/d-4371437/keagung-tetapkan-6-tersangka-dugaan-korupsi-kredit-bank-bumn> diakses pada 18 Maret 2019 pukul 23.47.

<https://covesia.com/archipelago/baca/52549/kejari-ungkap-kasus-dugaan-korupsi-di-koni-bukittinggi>

